

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, merupakan negara yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan tradisional lainnya, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dasar untuk memelihara persatuan dalam keragaman. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia diyakini kebaikan dan kebenarannya, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan) merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia (Lumintang dkk., 2023). Prinsip pertama yang tercantum pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar toleransi masyarakat Indonesia terhadap keberagaman agama, juga memberikan ruang bagi setiap agama untuk berkembang dan memainkan peran penting baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Dalam konteks ini, hubungan antara agama dan politik menjadi sangat penting. Tantangan politik yang muncul dari keragaman agama di Indonesia sering kali tercermin dalam dinamika pemilihan umum (pemilu).

Indonesia adalah negara yang berkhidmat untuk menjalankan prinsip demokrasi dengan melangsungkan Pemilu secara reguler (Anugerah, 2023). Pemilu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Pemilu, sebagai manifestasi demokrasi, menjadi arena di mana berbagai kepentingan, termasuk yang berbasis agama, bertemu dan kadang bertentangan.

Dalam praktiknya di Indonesia, bisa dipastikan bahwa pemilu akan terus diwarnai para aktor politik yang membangun citra diri yang lekat dengan simbol-simbol kultural atau agama (Ahnaf, 2018). Semua paham, bahwa agama adalah komoditas politik yang sangat penting untuk meraih dukungan, hal seperti ini biasa terjadi di dunia politik (Husaini, 2021). Penggunaan agama untuk kepentingan politik menjelang pemilu bukan sesuatu yang baru di negara kita ini, politisasi ini ada yang dilakukan secara terselubung melalui simbol-simbol agama atau secara terbuka dengan memanfaatkan mimbar-mimbar agama (Yunus dkk., 2023). Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa Pancasila merupakan sebuah landasan yang kuat di Indonesia untuk menyatukan berbagai kelompok agama, dalam praktiknya, keberagaman agama sering kali memunculkan tantangan dalam konteks politik. Dalam konteks politik dapat dinyatakan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan salah satu dimensi kunci dalam melihat dinamika politik identitas, khususnya identitas keagamaan (Hendardi, 2022).

Kondisi demikian disebabkan karena pertimbangan jumlah penduduk berdasarkan agama secara nasional memperlihatkan ketimpangan karena ada yang sangat dominan terutama agama Islam. Sementara beberapa wilayah lainnya menjadi kantong-kantong suara yang didominasi oleh penganut agama Kristen seperti Sulawesi Utara, Papua, Kab. Toraja, Sumatera Utara, NTT dan Ambon dan penganut Hindu terutama Bali.

Menjelang pemilu, politik identitas menjadi sebuah term yang tidak terelakkan hadir, karena semua orang atau kelompok memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan identitas melalui jalur politiknya masing-masing (Yunus dkk., 2023). Adanya politik identitas menjadi modal dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik (pasangan calon pemimpin tertentu), hal ini dibuktikan dengan terpilihnya pasangan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena didukung dengan adanya kekuatan Islam politik maupun politik Islam (Parinduri & Pujiati, 2023).

Semakin menguatnya politik identitas di Indonesia ditandai saat munculnya isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Dari tuntunan penegakan hukum terhadap Ahok, melebar menjadi ladang politik praktis untuk menyampaikan ajakan yang mereka pahami tentang haramnya kepemimpinan non-muslim dalam Islam yang wacananya digulirkan dalam aksi tersebut (Kurniawan, 2018). Insiden "Al Maidah 51" oleh mantan Gubernur Ahok beberapa tahun silam menjadi referensi yang kuat bagi elit untuk membangun rasionalitas agar umat Islam tidak memilih pemimpin yang bukan Islam serta pemimpin yang tidak berpihak pada pribumi (Kelana Putra, 2019). Meskipun isu kepemimpinan non-Muslim lebih terlihat di daerah mayoritas muslim seperti Jakarta, tidak dapat dipungkiri dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia, menjadikan isu ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Toraja.

Toraja adalah salah satu daerah di Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo' (Koyong, 2016). Masyarakat Toraja, meskipun mayoritas Kristen, telah lama menjalin hubungan yang damai dengan kelompok muslim dan pemeluk kepercayaan tradisional. Masyarakat Toraja memiliki rasa toleransi yang tinggi sehingga tidak pernah terdengar konflik antar umat padahal ada dua penganut agama yaitu Islam dan Kristen (Ryan Aulia & Syakirah Abu Nawas, 2021). Namun, dengan perkembangan teknologi dan media sosial, isu-isu yang awalnya terjadi di daerah mayoritas muslim seperti Jakarta kini merambah ke wilayah lain, termasuk daerah ini. Pengaruh media sosial dalam menyebarkan wacana politik identitas berbasis agama semakin menguat di kalangan kaum muda di Toraja.

Fenomena isu kepemimpinan non-Muslim itu menarik untuk dibahas dari sudut pandang kaum muda Kristen di Toraja, karena mereka tumbuh dalam

lingkungan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi Kristen, sementara juga terpapar oleh perkembangan politik dan teknologi informasi yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan isu-isu sosial. Dalam konteks kepemimpinan nasional yaitu dalam pemilihan presiden, kaum Kristen tidak memiliki pilihan selain memilih pemimpin dari kalangan muslim. Meskipun demikian, tidak pernah ada gerakan untuk tidak memilih baik berupa ajakan golput maupun boikot terhadap Pemilu dari kaum Kristen. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka tidak terpaku pada identitas agama sebagai satu-satunya faktor penentu. Fenomena ini menantang asumsi umum tentang politik identitas yang kerap kali dianggap dominan, dan membuka ruang untuk memahami lebih dalam mengapa kaum muda Kristen di Toraja tidak selalu terpaku pada identitas agama dalam menentukan pilihan politik mereka, meskipun isu kepemimpinan non-muslim mengemuka dalam konteks politik nasional. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor lain, seperti pengaruh partai politik, dinamika sosial lokal, dan perkembangan teknologi, yang berperan dalam membentuk preferensi politik mereka.

Untuk memahami konteks ini secara lebih mendalam, penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara agama dan politik, serta dinamika identitas dalam pemilu. Oleh karena itu, dalam bagian berikut, akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tema ini. Penelitian oleh Lestari Y. S (2018), yang berjudul “Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama” dengan metode penelitian kualitatif, menemukan hasil bahwa perpecahan yang muncul karena pengelompokan politik berdasarkan identitas keagamaan dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita hoax, persekusi, terbatasnya ruang demokrasi, dll.

Penelitian oleh Hario Putra dkk. (2024), dengan judul “Pengaruh Agama Islam Terhadap Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia” dengan metode pendekatan kualitatif dengan studi pustaka menyoroti pentingnya pemuka agama Islam (ulama) dalam membimbing umatnya dalam memahami kriteria pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ulama-ulama ini, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam politik praktis, memiliki pengaruh moral yang besar dalam masyarakat. Mengingat 86,93% penduduk Indonesia beragama Islam menurut sensus 2021, maka secara tidak langsung agama Islam akan memiliki keunggulan dibandingkan agama lain, penelitian menunjukkan bahwa Islam masih menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.

Penelitian oleh Glen dkk. (2024), dengan judul “Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam Melaksanakan Pemilihan Umum” yang menggunakan metode kualitatif, memberikan hasil pengaruh agama sebagai

identitas bukan hanya fenomena biasa pada pemilihan umum, tetapi telah menjadi fenomena yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Pengaruh agama memunculkan beragam reaksi atau respons di masyarakat. Hanya saja, pengaruh agama dapat memiliki dampak positif, namun juga bisa negatif di masa pemilihan umum. Toleransi antar kelompok adalah dampak positif, sementara kecurigaan, konflik, dan perpecahan adalah dampak negatif. Namun, studi ini berargumen bahwa pengaruh agama dalam bentuk dan skala apapun tidak akan merugikan pemilihan umum selama tidak menggunakan cara yang bertentangan dengan konstitusi.

Penelitian oleh Sonjaya & Rahayu Diningrat (2023), dengan judul “Relasi Agama dan Politik di Indonesia The Relationship between Religion and Politics in Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan menunjukkan hasil bahwa hubungan agama dan kekuasaan berbeda dari satu agama ke agama yang lain dalam praktik maupun dalam doktrinnnya. Namun pengalaman menunjukkan bahwa agama dan kekuasaan negara sulit dilepaskan. “Agama menjadi inti kekuasaan dan kekuasaan menjadi inti agama”. Pandangan ini perlu kita periksa dalam realitas komunitas agama masing-masing.

Penelitian oleh Ronaldo & Darmaiza (2021), dengan judul “Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan Studi ini menemukan bahwa ada dua simbol agama yang secara masif dipergunakan dalam penetapan Capres dan Cawapres Pemilu 2019, yakni identitas kemusliman dan identitas keulamaan. Capres dan Cawapres Pemilu 2019 yang berkontestasi adalah hasil dari tarik menarik simbol-simbol agama yang digunakan pada tahap awal Pemilu Presiden 2019. Pada tahap ini identitas Muslim menjadi tawaran yang ditransaksikan dalam penetapan pasangan Capres dan Cawapres. Begitu pula dengan ulama dan sejumlah Ormas keagamaan. Serangkaian seremonial keagamaan seperti ijtihad dan ijtimak turut dijadikan sebagai media pelegitimasi untuk memunculkan kontestan Pemilu Presiden 2019. Menariknya, hasil ijtihad dan ijtimak tidak bersifat statis dan baku, namun ia bersifat dinamis yang dapat berubah menyesuaikan dengan situasi politik yang terjadi. Hal ini kemudian telah menyebabkan menguatnya politik kebencian.

Penelitian oleh Wingarta dkk. (2021), dengan judul “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia (The Influence Of Identity Politics On Indonesian Democracy)”. Kajian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Kemunculan politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Demokrasi masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional”. Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih,

sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktik *money politics* untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis “agama” dan “non-agama”. Praktik Politik Identitas secara negatif berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan edukasi politik agar tercipta masyarakat yang rasional dan mampu berpartisipasi sesuai koridor demokrasi yang ada di Indonesia.

Penelitian oleh Simanjuntak & Fernandes (2022), dengan judul “Perilaku Pemilih Masyarakat Etnis Tionghoa dalam Pemilu Legislatif di Kota Padang” dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Kampung Pondok adalah pemilih kritis tradisional dan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat etnis Tionghoa tersebut yaitu, 1) faktor latar belakang etnis, dimana latar kesamaan latar belakang etnis menjadi faktor utama masyarakat etnis Tionghoa dalam memilih. 2) faktor kedekatan hubungan emosional pemilih dengan caleg 3) faktor agama (4) faktor partai politik (5) faktor organisasi kemasyarakatan.

Penelitian oleh Lestari, D (2019), dengan judul “Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia” menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan Politik identitas berhasil digunakan sebagai alat untuk menarik simpati Pemilih kepada salah satu calon yang memiliki latar belakang identitas yang sama. Keberhasilan ini dapat mengakibatkan elit politik yang memiliki kandidat pasangan calon dengan latar belakang identitas tertentu dari mayoritas pemilih di suatu daerah memutuskan untuk menggunakan politik identitas untuk menarik simpati Pemilih dengan identitas yang sama.

Penelitian oleh Reka Prasetia (2019), dengan judul “Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu”. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis empiris, penelitian ini memberikan usulan terkait dengan upaya penanganan eksploitasi politik identitas melalui media sosial agar disintegrasi sosial di kalangan generasi milenial dapat dicegah. Keberhasilan pelaksana Pemilu dalam menangani politik identitas melalui media sosial akan menghasilkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman dan demokratis, sehingga mampu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang kredibel.

Penelitian oleh Arifin (2022), dengan judul “Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia” menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi agama dalam politik tampaknya sangat menarik dalam diskursus ilmiah, karena terbukti ikut memainkan peran di dalam pertarungan politik nasional di Indonesia. Islam bahkan menjadi anak emas (masa keemasan) pasca reformasi dan terlihat kelompok Islam memiliki kesempatan

besar untuk mengekspresikan kekuatan politik mereka dengan mengartikulasikan agama di ruang publik (politik) di negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Demokrasi dan Agama (Islam) di Indonesia tentu tidak berjalan secara instan tanpa proses yang panjang. Tentu banyak tokoh yang ikut serta memberi kontribusi terhadap penegakan demokrasi di Indonesia, dan membingkai Indonesia sebagai Negara yang tidak anti demokrasi meskipun memiliki populasi Muslim yang terbesar.

Penelitian oleh Nasrudin dkk. (2018), dengan judul “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik identitas dan representasi politik mempengaruhi proses demokrasi pada kasus pilkada DKI 2018-2022.

Penelitian oleh Samosir & Novitasari (2022), dengan judul “Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu hak terpenting warga negara setiap orang untuk menentukan pilihan politik termasuk pilihan menentukan pemimpin yang akan mengambil tanggung jawab kebijakan Negara. Salah satu dari hak mendasar itu terwujud melalui hak pilih universal. Pemilihan umum dalam konteks Indonesia tidak seindah harapan di atas. Pengalaman pemilihan umum nasional Indonesia tahun 2014 dan tahun 2019 direcoki dengan politik identitas agama yang memuakkan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 juga tidak luput dari sasaran politik identitas agama. Rakyat pemilih bahkan muak melanjutkan proses demokrasi karena kampanye hitam dan kotor merusak batin rakyat di pemilu. Postur demokrasi Indonesia yang masih belum kuat malam semakin terpuruk. Kandidat presiden pun dikategorikan ke kandidat yang satu dianggap didukung oleh partai politik dengan sebutan partai politik yang diridhoi Allah, sementara calon presiden yang lain dikategorikan sebagai partai yang didukung oleh partai-partai yang diridhoi oleh setan atau iblis.

Penelitian oleh Rumbi, F.P. (2019), dengan judul “Politik Identitas Etnis Toraja sebagai Masalah Teologis: Kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara” penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian, tampak bahwa politik identitas digunakan untuk: Pertama, membudayakan bela rasa atau solidaritas. Kedua, mewujudkan kepentingan oknum tertentu pada ranah politik praktis terutama terkait dengan kedudukan dalam sistem pemerintahan. Kedua temuan memperlihatkan adanya kesenjangan visi dalam komunitas, situasi itu turut memicu konflik internal di antara mereka. Masalah tersebut perlu segera diatasi, secara khusus penulis menyorotinya dari perspektif teologi politik. Konflik dapat diatasi jika pihak-pihak yang bertikai mengadakan dialog mengutamakan nilai-nilai kehidupan seperti kasih, keadilan, dan damai sejahtera.

Penelitian oleh Sastrit dkk. (2023), dengan judul “Peran Agama dalam Pemilihan Pemimpin pada Tahun 2019” menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai masyarakat negara Indonesia memiliki demografis mayoritas penganut agama Islam, dan banyak pihak yang menjadikan hal ini sebagai sebuah alat untuk meraih kesuksesannya dengan pencitraan ketakwaan menjelang pemilu. Pemahaman tentang toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal, termasuk media sosial dan kampanye publik dengan diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan bahwa pemilihan pemimpin seharusnya dilakukan secara bijaksana dan tidak dipengaruhi oleh faktor agama atau *persuasive*.

Penelitian oleh Made dkk. (2018), dengan judul “Dinamika Politik Identitas Masyarakat Muslim Bali Pada Pilgub Bali Tahun 2018” menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan politik identitas masyarakat muslim di Bali sangatlah dinamis terutama dalam situasi di mana mereka menganggap diri mereka sebagai golongan minoritas. Masyarakat muslim Bali tetap memberikan dukungan bahkan memilih pemimpin non muslim sejauh agenda politik dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ada tidak berseberangan dengan politik identitas mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa seluruh pasangan calon melakukan berbagai pendekatan politik terhadap masyarakat muslim Bali yang mana hal tersebut semakin memperlihatkan bahwa kini masyarakat muslim Bali yang merupakan golongan minoritas memiliki posisi tawar politik.

Penelitian oleh Triantoro (2019), dengan judul “Praktik Politik Identitas dalam Akun Media Sosial Anies-Sandi” menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik politik identitas di akun Media Sosial Anies-Sandi cenderung menampilkan simbol-simbol keagamaan Islam. Menguatnya praktik politik identitas tersebut merepresentasikan kemunculan gerakan Islam radikal, konservatif, Islamisme, dan muslim kelas menengah ke atas di Indonesia. Akhirnya, politik identitas secara perlahan akan melemahkan demokrasi Pancasila di Indonesia.

Penelitian oleh (Manese, 2021) dengan judul “Relasi Agama Dan Politik: Preferensi Politik Pemilih Millennial Di Ponosakan Belang, Dalam Pilkada Sulawesi Utara Tahun 2020” menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Pilkada 2020 di Sulawesi Utara terdapat salah satu calon yang beragama Islam dan ini menjadi preferensi bagi pemilih millennial di Ponosakan Belang untuk memilih kandidat tersebut. Pembacaan menggunakan teori sosiologis, preferensi memilih pemimpin Islam karena keyakinan dan agama yang sama. Secara psikologis, hadirnya preferensi politik pemilih millennial disebabkan adanya isu yang menggunakan simbol-simbol Islam. Tesis penulis adalah dalam demokrasi *electoral* hubungan agama dan negara sulit dipisahkan, agama menjadi pertimbangan penting dalam politik.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa agama memiliki pengaruh signifikan dalam politik dan pemilu di Indonesia, seperti yang ditemukan oleh Hario Putra dkk., (2024). Peneliti menyoroti peran agama, khususnya Islam, dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Penelitian serupa oleh Made dkk., (2018) serta Sastrit dkk., (2023) mengungkap bahwa agama juga mempengaruhi dinamika politik lokal dan pemilihan pemimpin. Sonjaya & Rahayu Diningrat (2023), Ronaldo & Darmaiza (2021), Wingarta dkk., (2021), dan Triantoro (2019), membahas politik identitas dan bagaimana agama serta identitas sosial mempengaruhi demokrasi. Beberapa penelitian, seperti oleh Lestari, D (2019), dan Simanjuntak & Fernandes (2022) meneliti perilaku pemilih berdasarkan identitas agama dan etnis. Temuan mereka menunjukkan bahwa identitas agama dan sosial berperan penting dalam preferensi pemilih di berbagai pemilu lokal. Reka Prasetya (2019), menyelidiki peran media sosial dalam memengaruhi politik identitas dan bagaimana media digital berperan dalam memperkuat atau memoderasi konflik sosial berbasis agama selama pemilu. Samosir & Novitasari (2021) dan Rumbi (2019) membahas politik identitas dalam konteks minoritas Kristen, menunjukkan bagaimana komunitas Kristen menghadapi tantangan politik identitas. Selain itu, Lestari Y. S, (2018) menyoroti dinamika politik identitas, mengungkap bahwa politik berbasis agama dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi. Arifin (2022) meneliti peran agama dalam pemilu di Indonesia, menggarisbawahi bahwa agama tetap menjadi faktor penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya agama, politik identitas, perilaku pemilih, partisipasi politik umat Kristen, dan peran media sosial dalam mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Berangkat dari hasil penelitian terdahulu yang telah di klasifikasikan, sebagian besar penelitian yang terkait dengan politik identitas dan agama dalam pemilu menekankan pada kelompok mayoritas Muslim di Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan kota-kota besar seperti Jakarta. Sementara pandangan politik dari kaum muda Kristen di daerah mayoritas Kristen seperti Toraja masih kurang diperhatikan. Selain itu, meskipun beberapa penelitian membahas politik identitas dan agama, namun secara antropologis, alasan utama mengapa kaum muda Kristen di Toraja memilih pemimpin Muslim dalam pemilu belum sepenuhnya dijelaskan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan dan metode etnografi, mengungkap faktor-faktor budaya, agama, dan politik lokal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana pandangan politik kaum muda di Toraja dibentuk oleh interaksi antara nilai-nilai agama Kristen, realitas politik lokal, dan dinamika sosial-budaya yang lebih luas, yang pada akhirnya mempengaruhi preferensi politik mereka.

1.2 Masalah Penelitian

Setelah melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari, D (2019) yang mengatakan bahwa politik identitas berhasil digunakan sebagai alat untuk menarik simpati pemilih kepada salah satu calon yang memiliki latar belakang identitas yang sama. Hal ini sejalan dengan penelitian Hario Putra dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa Islam masih menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam memilih calon presiden dan wakil presiden. Akankah hasil penelitian Lestari D (2019) dan Hario Putra dkk. (2024), dapat sesuai dengan pandangan politik pemilih Kristen di Toraja. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan kaum muda Kristen berkenaan dengan isu agama dalam proses pemilu presiden?
2. Apa saja reaksi yang kaum muda Kristen Toraja dalam menanggapi isu agama dalam proses kampanye pemilihan presiden?
3. Apa saja pertimbangan kaum muda Kristen dalam memilih pemimpin negara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat tujuan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan pandangan kaum muda Kristen berkenaan dengan isu agama dalam proses pemilu presiden.
2. Menjelaskan apa saja reaksi kaum muda Kristen terhadap isu-isu agama di pemilihan presiden.
3. Menganalisis apa saja pertimbangan kaum muda Kristen dalam memilih pemimpin negara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang kajian politik identitas keagamaan di Toraja melalui perspektif Etnografi.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada partai politik, pemimpin, dan pengambil kebijakan tentang dinamika pemilih di Toraja.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1 Agama dan Politik

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang, dimana berdasarkan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi salah satu landasan bagi hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Hubungan Pancasila dan agama adalah hubungan yang saling membutuhkan, dimana agama memberikan peningkatan moral bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram dan damai ((Dwi Tsoraya dkk., 2023). Menurut Agus Supratikno, keberadaan sila pertama Pancasila menunjukkan keberadaan politis agama dalam demokrasi Indonesia sebagai sebuah keniscayaan (Malino dkk., 2024). Hal ini mencerminkan bahwa agama adalah salah satu aspek yang memainkan atau memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara konseptual agama menurut Faisal Ismail (1997) yang dikutip dari (Asrori dkk., 2023) dijelaskan sebagai suatu aturan yang memandu kehidupan manusia, etika, dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama, termasuk dunia politik seperti pelaksanaan suksesi kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Arifin, 2022). Politik, berasal dari bahasa Yunani; politikos, yang berarti; dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, politik merupakan adalah proses pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang mencakup proses pengambilan keputusan, terutama di negara (Sonjaya & Rahayu Diningrat, 2023). Di mata politik, agama menjadi salah satu sarana utama untuk meraih suara atau dukungan dalam politik (Palepa dkk., 2024). Dengan pemahaman ini, agama tidak hanya menjadi panduan moral tetapi juga alat strategis dalam arena politik, seperti yang terlihat dalam praktik politik di Indonesia.

Salah satu praktik politik di Indonesia yang biasa digunakan oleh kandidat dalam mencari dukungan adalah melalui peran tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat. Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti : para Kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain (Haerul, 2022). Banyak yang menganggap bahwa pilihan tokoh agama ialah yang paling benar karena mereka telah mengetahui seluk beluk dari konsep agama dan ilmu keduniawian (Amin dkk., 2023). Pada pemilihan presiden tahun 2019 silam, dapat dilihat dengan jelas bagaimana pemanfaatan tokoh agama memberikan peran penting bagi kandidat Jokowi-Maruf Amin. Adapun alasan Jokowi memilih Maruf Amin adalah Maruf Amin dianggap sebagai agamawan yang bijaksana, selain itu juga pengalamannya di pemerintahan (Saputro, 2018). Pemanfaatan ketokohan kaum agamawan tampaknya menjadi salah satu strategi mendulang suara (vote getter)

ternyata cukup terbilang sukses dalam pelaksanaan demokrasi pilpres di Indonesia, bukan hanya pemilu Pilpres 2019, akan tetapi juga terjadi pada pemilu Pilpres sebelumnya meskipun pada kenyataan setelah kemenangan terlihat dengan kasat mata kursi kekuasaan terhadap agamawan terlihat sangat sedikit, akibatnya strategi agama (Islam) untuk memenangkan calon sang penguasa sepertinya hanya menjadi strategi propaganda saja (Arifin, 2022).

Kemudian praktik politik lainnya yang sering digunakan oleh para kandidat dalam mencari dukungan dari masyarakat adalah dengan membangun *personal branding* yang agamawan. Pada tahap pembentukan citra politik ketika melakukan kampanye dapat dikatakan sebagai *personal branding* yaitu dengan maksud mengidentifikasi seseorang dengan sesuatu yang digunakan tetapi memiliki efek yang sangat nyata, hal ini digunakan untuk membuat atau memberi tanda bagi calon legislatif kepada para pemilih atau masyarakat pada saat pemilihan umum (pemilu) (Malik dkk., 2021). Artinya simbol agama sebagai metode komunikasi non verbal yang di artikulasikan menjadi proses transaksi sosial yang dipergunakan oleh manusia atau partai politik untuk mengkonstruksi makna yang merupakan imajinasi tentang kebenaran melalui kekuatan makna simbolik agama (Sipa, 2021). Strategi ini melibatkan retorika keagamaan, pemakaian atribut religius seperti baju khas agama tertentu, hingga penggunaan tempat ibadah untuk memperkuat citra religius (Abadi, 2024). Selain itu, pada Pemilihan Presiden tahun 2024 yang belum lama ini dilaksanakan, citra politik berbasis keagamaan juga digunakan oleh Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDIP. Ganjar Pranowo memanfaatkan media sosial dengan mengunggah gambar dirinya saat sedang salat, bertemu dengan ulama dan santri, serta tampil dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi. Strategi ini menunjukkan upaya Ganjar Pranowo dalam membangun citra religius di hadapan pemilih yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dengan menampilkan kedekatannya dengan simbol-simbol agama, ia berusaha menarik simpati masyarakat, khususnya kalangan pemilih Muslim. Dengan demikian, strategi *personal branding* berbasis agama menjadi salah satu cara yang efektif untuk menciptakan hubungan emosional antara kandidat dan pemilih, terutama dalam masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai religius. Praktik ini tidak hanya membantu membentuk citra religius seorang kandidat, tetapi juga berperan dalam memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemanfaatan simbol dan makna keagamaan yang disusun secara strategis.

Fenomena ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa agama memiliki peran penting dalam membentuk identitas politik di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius menjadikan agama sebagai elemen yang mudah dimanfaatkan dalam upaya mobilisasi politik. Dengan berbagai strategi politik yang melibatkan agama, penting untuk memahami bagaimana keterkaitan antara agama dan politik ini berdampak pada dinamika sosial, politik, dan demokrasi di Indonesia. Dari perspektif toleransi,

agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan, yang mendukung pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Namun, dari perspektif konservatisme, penggunaan agama sebagai alat politik dapat menyebabkan polarisasi, intoleransi, dan konflik antar agama (Helena Ray, 2023). Hubungan antara agama dan politik di Indonesia sangat rumit dan berpengaruh pada berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk sosial, hukum, dan ekonomi. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan semua kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok mayoritas atau elit tertentu, Indonesia dapat membangun tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan (Akmal dkk., 2024).

2.2 Pendekatan Pengambilan Keputusan Politik

Keputusan pada dasarnya merupakan suatu langkah yang diambil setelah melewati proses pemikiran, pengkajian, dan penilaian terhadap berbagai opsi yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Anwar yang dikutip dari (Muktamar dkk., 2023) bahwa keputusan melibatkan: (1) adanya pilihan berdasarkan logika atau pertimbangan; (2) adanya beberapa alternatif yang harus dipilih satu yang dianggap terbaik; dan (3) adanya tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan diarahkan untuk mendekatkan diri pada pencapaian tujuan tersebut. Hal ini berarti bahwa pilihan yang dibuat bukan sekedar sewenang-wenang saja, akan tetapi melalui suatu metode yang terorganisir dan rinci. Pilihan harus didasarkan pada alasan yang rasional, memperhatikan berbagai pilihan yang ada, dan ditujukan untuk mencapai sasaran. Menurut Steiner dalam (Rahmawati dkk., 2024) pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses manusiawi berdasarkan baik dari fenomena individu maupun sosial, pada asumsi nilai dan fakta, yang menyimpulkan sebuah pilihan dari berbagai alternatif dengan maksud beralih menuju sebuah tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, dapat dijelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang melibatkan pertimbangan individu dan interaksi sosial manusia, dimana mereka mengevaluasi berbagai pilihan yang ada dengan mempertimbangkan nilai-nilai, data atau situasi yang relevan. Pilihan yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh analisis logis, akan tetapi juga oleh unsur sosial, budaya, serta pengalaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok terkait.

Proses pengambilan keputusan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, melainkan juga dilakukan dalam arena politik. Dalam konteks pengambilan keputusan politik oleh masyarakat dapat berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum dimana masyarakat memiliki hak untuk memilih calon pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu salah satu contoh pengambilan keputusan politik juga dapat ditemukan pada saat musyawarah mufakat dimana masyarakat berhak untuk mengambil keputusan terhadap kebijakan baik ditingkat nasional maupun daerah yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Adapun bentuk swadaya masyarakat sebagai hasil

dari keikutsertaan masyarakat, dibagi menjadi tiga macam yaitu: dalam bentuk konsumsi yang ditunjukkan kepada pelaksana teknis (tukang), tenaga pada saat pelaksanaan program dan gagasan atau ide perumusan suatu program (Maya dkk., 2024).

Dalam aspek antropologi politik, proses pengambilan keputusan di bidang politik bisa diartikan sebagai elemen dari interaksi sosial yang mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas kelompok, dan norma-norma adat yang hidup dalam suatu masyarakat atau komunitas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Kodi, 2021) bahwa bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan dan kepemimpinan. Sehubungan dengan pengambilan keputusan politik, berbagai teori telah dikembangkan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok membuat pilihan dalam konteks sosial dan politik tertentu.

Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan (Puspitasari & Adnan, 2020). Salah satu teori pengambilan keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rasionalitas. Menurut Max Weber, tindakan rasional adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat (Dwi Putri dkk., 2020). Melihat definisi tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mengambil keputusan secara gegabah, tetapi berdasarkan pertimbangan yang matang, seperti manfaat, akibat, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks politik, teori rasional ini membantu menjelaskan bagaimana individu atau kelompok memilih pemimpin atau kebijakan tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang paling menguntungkan bagi mereka, daripada sekedar mengikuti tradisi, sentimen, atau tekanan sosial. Teori keputusan ini juga menilai pengambil keputusan memiliki informasi yang sempurna terhadap seluruh tingkat peluang dari sebuah peristiwa yang tidak pasti (Pasolong, 2023). Hal ini memberikan pengertian untuk melihat bahwa dalam pemilihan umum di masyarakat majemuk seperti Toraja, teori rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik tercermin dalam cara individu dan kelompok mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat pilihan mereka. Selain itu, kecenderungan pemilih untuk mendukung kandidat juga dapat dikaitkan dengan tingkat akses mereka terhadap informasi. Dengan demikian, dalam ranah politik, individu dan kelompok cenderung bersikap pragmatis dengan memilih opsi yang mereka anggap memberikan manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri dan masyarakat luas.

Pendekatan yang efektif haruslah bersifat inklusif, mengakomodasi beragam kepentingan, pandangan, dan kebutuhan dari seluruh spektrum masyarakat (Damanik, 2023). Dari pendekatan seperti ini dapat dilihat dampak dari pengambilan keputusan politik yang rasional terkhusus pengambilan

keputusan di daerah majemuk seperti Toraja sangatlah luas. Selain meningkatkan kohesi sosial dan stabilitas politik, pendekatan rasional bertujuan untuk memilih pemimpin yang juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan demokrasi yang lebih sehat.

2.3 Pandangan Sebagai Ekspresi Kebudayaan

Pandangan adalah hasil dari proses interpretasi makna yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, simbol, pengalaman hidup, serta konteks sosial dan budaya tempat individu atau kelompok berada. Dalam kerangka antropologi budaya, pandangan tidak berdiri sendiri sebagai opini personal semata, melainkan merupakan cerminan dari kebudayaan yang dianut dan diwariskan. Kebudayaan menurut Geerts secara jelas didefinisikan dalam jurnal yang dikutip dari (Nasruddin, 2011) bahwa “kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun. Dalam pengertian di mana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya; suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis diwujudkan di dalam bentuk-bentuk simbolik melalui sarana di mana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikannya, dan mengembangkan pengetahuan dan sikap-sikapnya ke arah kehidupan; suatu kumpulan peralatan simbolik untuk mengatur perilaku, sumber informasi yang ekstrasomatik.” Kutipan tersebut mengungkapkan bahwa kebudayaan tidak hanya terbatas pada tradisi atau kebiasaan yang tampak secara fisik, melainkan juga melibatkan sistem makna yang rumit dan diwariskan secara historis melalui simbol-simbol tertentu. Dalam kerangka ini, cara individu atau kelompok memahami dunia, mengekspresikan perasaan, serta mengambil sikap dan keputusan, merupakan bagian dari proses budaya. Dengan demikian, pandangan terutama dalam konteks sosial-politik dapat dipahami sebagai bagian dari kebudayaan itu sendiri. Sebagai contoh, pandangan politik generasi muda terbentuk melalui interaksi simbolik dengan lingkungan sekitar, nilai-nilai keluarga, pendidikan, agama, serta pengaruh media massa, yang semua itu berkontribusi pada pola pikir dan penilaian mereka terhadap kehidupan politik. Dengan memandang pandangan sebagai bagian dari sistem makna yang diwariskan, penelitian ini berupaya meneliti perspektif kaum muda Kristen Toraja terkait isu agama dalam pemilihan pemimpin sebagai manifestasi kebudayaan yang layak untuk ditelusuri secara antropologis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Moloeng (2007: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui tentang apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh menggunakan cara deskripsi pada bentuk istilah-istilah dan bahasa, dalam konteks spesifik yang dialami karakter kualitatif pada prinsipnya lebih mengunggulkan pada pandangan deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis mencoba melihat dan memahami fenomena sosial secara mendalam, dengan fokus pada pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Etnografi. Ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi ini adalah sifatnya yang menyeluruh dan terpadu (*holistic-integratif*), deskripsi yang kaya (*thick description*) dan analisa kualitatif dalam rangka mendapatkan cara pandang pemilik kebudayaan (*native's point of view*) (Siddiq & Salama, 2019).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Tana Toraja terkenal dengan budaya yang kaya dan tradisi yang unik, terutama dalam konteks keagamaan. Selain itu, Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten di Toraja yang menjadi wilayah dengan jumlah DPT terbanyak pada saat pemilu 2024 dengan jumlah 196.548 DPT. Hal ini membuat Kabupaten Tana Toraja menjadi kantong suara Kristen terbesar di Sulawesi Selatan yang sangat penting pada saat pemilihan gubernur dan kepala negara. Meskipun demikian masyarakat Kristen dan Muslim hidup berdampingan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penelitian tentang interaksi identitas agama dan politik.

Waktu penelitian dilaksanakan pada akhir bulan Januari 2025 hingga bulan Februari 2025 dengan alasan pada waktu ini penulis dapat bertemu dengan bebas dengan kaum muda Kristen di Toraja karena adanya masa libur. Selain itu, waktu ini dipilih agar tidak mengganggu aktivitas akademik dan penulis lebih berfokus pada penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan *purposive* (penentuan secara sengaja). Informan dipilih berdasarkan kriteria spesifik yaitu generasi muda yang pada pemilu 2024 sudah memilih atau yang berusia 17 hingga 40 tahun. Pemilihan umur ini berdasarkan penuturan dari anggota KPU, Betty Epsilon Idroos yang mengatakan bahwa kalau usia muda 17-40 tahun (Triono, 2023). Selain itu, kriteria spesifik yang lainnya adalah generasi muda yang tinggal atau berasal dari Toraja, beragama Kristen, dan aktif dalam

kehidupan sosial dan politik. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1.	Kak Yorin	26 Tahun	Tidak Bekerja
2.	Kak Parlan	39 Tahun	Guru
3.	Kak Ita	33 Tahun	Guru Sekolah Minggu
4.	Kak Sakti	25 Tahun	Mahasiswa
5.	Kak Rian	28 Tahun	Guru
6.	Kak Anti	33 Tahun	Pegawai DISHUB
7.	Kak Ririn	29 Tahun	Tidak Bekerja
8.	Kak Paris	27 Tahun	Majelis Gereja
9.	Kak Stephen	39 Tahun	Majelis Gereja
10.	Kak Yobel	35 Tahun	Perawat
11.	Kak Nori	24 Tahun	Fresh Graduate
12.	Kak Ricky	24 Tahun	Fresh Graduate
13.	Feli	20 Tahun	Mahasiswa
14.	Doni	21 Tahun	Mahasiswa
15.	Otniel	21 Tahun	Mahasiswa

Tabel 3.1 Tabel Daftar Informan

Informan dalam penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk majelis gereja, masyarakat biasa, mahasiswa Kristen, lulusan sarjana, guru, anggota organisasi politik, dan individu yang tidak bekerja. Pemilihan informan didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu kesediaan mereka untuk diwawancarai dan pemahaman mereka terhadap isu agama maupun politik, sehingga mereka dapat memberikan pandangan yang relevan dan mendalam terhadap tema penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam. Menurut Koentjaraningrat wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung (Anindri, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan dua metode, yaitu tatap muka langsung dan *video call* melalui WhatsApp. Wawancara tatap muka dilakukan dengan bertemu langsung dengan informan di tempat yang telah disepakati sebelumnya, setelah terlebih dahulu membuat janji. Sementara itu, wawancara melalui *video call* dilakukan untuk beberapa informan yang berada di luar kota dan sulit dijangkau secara langsung. Penulis melakukan wawancara jarak jauh ini karena ingin mendengar perspektif kaum muda Kristen yang sedang kuliah di luar Toraja, di mana mereka mungkin lebih banyak terpapar dengan berbagai isu agama dan politik dibandingkan mereka yang tinggal di Toraja. Wawancara mendalam dilaksanakan menggunakan panduan wawancara yang dirancang agar pembahasan

terstruktur dan tidak keluar dari fokus penelitian. Wawancara direkam setelah mendapatkan persetujuan dari informan dan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut.

Selain wawancara, penulis juga melakukan pengambilan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja untuk mendapatkan data pemilu 2024 di wilayah tersebut. Proses ini berjalan lancar tanpa kendala, karena pihak KPU melayani dan memberikan data yang penulis perlukan dengan baik.

Secara umum, tidak ada kesulitan berarti dalam proses wawancara di lapangan. Salah satu faktor pendukungnya adalah kedekatan penulis dengan sebagian besar informan, sehingga proses membangun *rapport* berlangsung secara alami dan tidak ada hambatan dalam menciptakan suasana wawancara yang nyaman. Selain itu, fleksibilitas dalam menyusun jadwal wawancara juga menjadi keuntungan tersendiri, karena penulis dapat menyesuaikan waktu dengan kesediaan informan, baik di pagi, siang, maupun malam hari.

Namun, kendala yang muncul terjadi ketika penulis menanyakan pilihan calon presiden yang mereka pilih. Beberapa informan sangat menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luberjurdil*) dalam pemilu, sehingga enggan mengungkapkan pilihannya secara langsung. Dalam hal ini, penulis sepenuhnya menghormati dan menghargai keputusan mereka yang memilih untuk tidak menyebutkan pilihannya. Selain itu, beberapa juga merasa was-was dan khawatir jika rekaman suara yang penulis ambil dapat terdengar oleh pihak luar. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, penulis memberikan jaminan kerahasiaan dengan menegaskan bahwa data wawancara hanya akan penulis gunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan disebarluaskan. Penulis juga memberikan kebebasan kepada mereka, jika tidak ingin direkam, maka wawancara tetap dapat dilakukan tanpa rekaman. Hal ini membantu menciptakan rasa aman dan membuat informan lebih terbuka dalam menjawab pertanyaan.

Dalam aspek teknis wawancara, terdapat beberapa tantangan kecil lainnya. Beberapa informan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya, sehingga penulis perlu membantu mereka dengan memberikan pertanyaan lanjutan atau melakukan klarifikasi agar mereka dapat menjawab dengan lebih lancar. Selain itu, penulis juga menyadari bahwa penulis terkadang lupa untuk menggali pertanyaan lanjutan dari jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga ada kemungkinan beberapa aspek yang sebenarnya bisa dieksplorasi lebih dalam tidak tergali secara maksimal. Meskipun demikian, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti membimbing informan dalam menjelaskan pemikirannya serta lebih aktif dalam mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih eksploratif kepada informan lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, bentuk analisis yang dilakukan adalah teknik analisis data menurut Creswell yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif, seperti menyediakan data mentah yang berupa transkrip, catatan lapangan dan pandangan peneliti sendiri, mengorganisasikan

dan menyiapkan data yang akan dianalisis, membaca seluruh data, melakukan koding, menyusun tema-tema dan deskripsi data, mengkonstruksi antar tema, interpretasi dan memberi makna tema yang telah disusun (Erma Ariyani dkk., 2024).

3.6 Etika Penelitian

Etika dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga integritas penelitian dan menghormati hak-hak informan. Pada tahap awal, penelitian ini mendapatkan izin dari Departemen Antropologi Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Setelah izin tersebut diperoleh, penulis melanjutkan dengan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapatkan izin dari DPM-PTSP Provinsi Sulawesi Selatan, maka dilanjutkan dengan permohonan izin kepada DPM-PTSP Kabupaten Tana Toraja. Setelah itu penulis juga mengambil surat izin dari kantor lurah tempat peneliti melakukan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan permohonan izin ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja, guna mendapatkan izin untuk pengambilan data di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Toraja.

Sebelum melakukan wawancara, penulis memperkenalkan diri kepada informan dan menjelaskan secara jelas maksud dan tujuan penelitian. Setelah itu penulis memulai dengan mempersiapkan lembaran etika penelitian dan surat izin meneliti yang mencakup informasi instansi yang memberikan dukungan dan izin untuk melakukan penelitian ini. Surat izin ini berfungsi untuk memberikan kepercayaan kepada informan bahwa penelitian ini telah mendapatkan persetujuan resmi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Setelah semua dokumen disiapkan, penulis menginformasikan tentang bagaimana data yang diperoleh akan digunakan dan pentingnya partisipasi informan dalam penelitian ini. Penulis meminta persetujuan informan sebelum melakukan wawancara. Informan akan diberi kesempatan untuk bertanya dan memastikan bahwa mereka memahami hak mereka dalam penelitian ini, termasuk hak untuk menolak wawancara tanpa konsekuensi. Jika penulis ingin mengambil foto, video, atau merekam audio selama wawancara, izin akan diminta terlebih dahulu dari informan. Penulis tidak akan memaksa atau merekam tanpa sepengetahuan informan. Keputusan untuk merekam akan sepenuhnya menjadi hak informan. Selama pengumpulan dan publikasi hasil penelitian, penulis merahasiakan identitas informan. Jika informan tidak ingin identitasnya dipublikasikan, penulis menghormati permintaan tersebut dan memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak dapat mengidentifikasi individu secara langsung. Mengingat konteks penelitian yang dilakukan di Tana Toraja, penulis menghormati norma-norma budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian dengan cara yang sensitif dan tidak mengganggu masyarakat setempat.